

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penetapan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata dan harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Keluarnya Undang-Undang tersebut merupakan dasar diberlakukannya sistem desentralisasi pada sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Menurut Pratolo (2003) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan

daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Halim (2004) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa wujud dari penyelenggara otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran

kinerja yang diharapkan oleh masyarakat maupun untuk n akuntabilitas terhadap masyarakat.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap a pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam r pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan do kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang : (Mardiasmo, 2002). DPRD akan mengawasi kinerja pemerin anggaran, oleh karena itu anggaran daerah harus bisa menjadi pencapaian kinerja yang diharapkan, setidaknya menggambarkan kinerja yang jelas.

Kenis (1979) dalam Darma & Halim (2005) menyatakan bahwa sasaran anggaran menggambarkan luasnya anggaran yang dinya jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertan terhadap pencapaiannya. Anggaran merupakan elemen kunci (i dalam sistem perencanaan dan pengendalian (Schieff & Lewis, Darma & Halim, 2005). Anggaran merupakan alat untuk menceg asimetri dan perilaku disfungsional dari agen pemerintah daerah 2003) serta merupakan proses akuntabilitas (Jones & Pendl Bastian, 2001; Kluvers, 2001; dalam Suhartono & Solik Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran

Penelitian Darma (2004) mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah. Namun sebaliknya, penelitian Suhartono & Solichin (2007) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manjerial. Penelitian Jumirin (2001) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan penelitian dibidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, menunjukkan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan dampaknya. Fahrianta & Ghozali (2002) dan Riyanto (2003) menyatakan bahwa kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian mengenai anggaran dan implikasinya, disebabkan adanya faktor-faktor tertentu (*situational factor*) atau yang lebih dikenal dengan istilah variabel kontijensi (*contingency variable*).

Untuk menjamin anggaran dengan baik, perlu dilakukan pengendalian. Hill (1988) dalam Darma (2004) menyatakan bahwa agar kinerja yang diharapkan dapat meningkat setelah adanya desentralisasi, pengambilan keputusan operasi harus mengadopsi pengendalian akuntansi dan pengendalian-pengendalian yang diperlukan. Darma (2004) menyatakan bahwa salah satu jenis pengendalian adalah pengendalian keuangan dengan

langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Menurut Abdullah (2005) dalam konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepala daerah kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya paling sedikit mendapatkan dua hal penting apabila menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Pertama, mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang dibuat kepala SKPD. Kedua penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala SKPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efisien dan efektif.

Konsep komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang peranan penting dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Riyanto (2003) komitmen organisasi merupakan salah satu *contextual factors* yang mempengaruhi keefektifan sistem pengendalian. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi (Mowday *et al.*, 1979 dalam Darma, 2004). Motivasi lainnya dari peneliti untuk meneliti konstruk pada lingkup anggaran (dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran) dan pada akuntansi (dalam hal sistem pengendalian akuntansi) adalah karena pada kedua lingkup tersebut di sektor publik khususnya pemerintahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul **“PENGARUH INTERAKSI KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGEDALIAN AKUNTANSI TERHADAP PERSEPSI APARAT PEMERINTAH DAERAH ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Klaten)”**. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2005). Pengembangannya terletak pada penambahan variabel moderating yaitu komitmen organisasi dan sampel berasal dari Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah terdapat interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas

4. Apakah terdapat interaksi antara pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi terhadap persepsi aparat atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengaruh pengendalian akuntansi terhadap persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Interaksi antara pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi terhadap persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Memberikan gambaran mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, persepsi aparat pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja, dan komitmen organisasi.
2. Dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Klaten dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan yang berkaitan dengan strategi pencapaian kinerja pada organisasi pemerintah